

ANALISIS DAMPAK DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMULIHAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN NATUNA

SOCIO-ECONOMICS IMPACT ANALYSIS AND CONDITION RECOVERY POLICY STRATEGI POST-LANDSLIDE DISASTER IN NATUNA REGENCY

Andi Miftahul Farid

(Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna)

Ellyzan

(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna)

Lia Oktavera

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna)

Abstrak

Bencana tanah longsor terjadi di Pulau Serasan Kabupaten Natuna tanggal 6 Maret 2023 mengakibatkan 54 orang meninggal dunia, 100 rumah penduduk terdampak, dan kerusakan infrastruktur. Perlu adanya penelitian yang membahas dampak sosial-ekonomi pasca bencana tanah longsor di Natuna, sebagai bahan pertimbangan pemilihan strategi kebijakan pemulihan kondisi sosial-ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak sosial-ekonomi dan memberikan rekomendasi strategi kebijakan pemulihan kondisi sosial-ekonomi pasca bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna, dengan metode penelitian kualitatif. Bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna tidak berdampak secara signifikan terhadap alat-alat produksi perikanan tangkap, tetapi berdampak pada keluarga nelayan yang tulang punggung keluarganya meninggal akibat bencana. Dampak sosial-ekonomi pasca bencana tanah longsor di Natuna adalah ; (1) sebanyak 100 keluarga akan menempati hunian baru yang disediakan oleh Pemerintah, (2) infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi memerlukan perbaikan, (3) hilang dan rusaknya dokumen pribadi masyarakat, dan (4) sebagian masyarakat yang terdampak bencana akan beralih usaha ekonomi rumah tangganya. Strategi kebijakan untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi melalui perbaikan infrastruktur, pelatihan keterampilan usaha, pemodalan usaha, penguatan produksi perikanan tangkap, dan penguatan komunitas tanggap bencana berbasis masyarakat.

Kata Kunci : Bencana, Tanah Longsor, Kabupaten Natuna, Dampak Sosial Ekonomi.

Abstract

The landslide disaster occurred on Serasan Island, Natuna Regency on March 6 2023 resulting in 54 deaths, 100 residents' houses were affected, and infrastructure damage. There is a need for research that discusses the socio-economic impacts after the landslide disaster in Natuna, as a material for consideration in choosing a policy strategy to restore socio-economic conditions. The purpose of this study is to describe the socio-economic

impacts and provide recommendations for policy strategies for recovering socio-economic conditions after the landslide disaster in Natuna Regency, using qualitative research methods. The landslide disaster in Natuna Regency did not have a significant impact on capture fisheries production equipment, but did have an impact on fishermen's families whose family backbone died as a result of the disaster. The socio-economic impacts after the landslide disaster in Natuna are; (1) as many as 100 families will occupy new housing provided by the Government, (2) supporting infrastructure for economic activities requires repair, (3) loss and damage of people's personal documents, and (4) some communities affected by the disaster will switch their household economic businesses. Policy strategies to restore socio-economic conditions through infrastructure improvements, business skills training, business capital, strengthening capture fisheries production, and strengthening community-based disaster response.

Keywords: *Disaster, Landslide, Natuna Regency, Socio-Economics Impact*

A. PENDAHULUAN

Tanah longsor merupakan salah satu bencana yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia. Naryanto dkk (2019) mendeskripsikan tanah longsor sebagai proses perpindahan massa batuan (tanah) akibat gaya berat (gravitasi). Longsor terjadi karena adanya gangguan kesetimbangan gaya yang bekerja pada lereng, yaitu gaya penahan dan gaya peluncur. Gaya peluncur dipengaruhi oleh kandungan air, berat massa tanah itu sendiri berat beban bangunan. Ketidakseimbangan gaya tersebut diakibatkan adanya gaya dari luar lereng yang menyebabkan besarnya gaya peluncur pada suatu lereng menjadi lebih besar daripada gaya penahannya, sehingga menyebabkan massa tanah bergerak turun.

Tanah longsor merupakan bencana alam yang menimbulkan korban dan menyebabkan kerusakan properti serta infrastruktur secara signifikan. Tanah longsor termasuk setiap gerakan ke bawah secara tiba-tiba material permukaan seperti tanah liat, pasir dan kerikil/batu. Tanah longsor adalah bencana alam utama di pegunungan yang terjadi karena efek gempa bumi atau curah hujan (Pareta & Pareta, 2012).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021. Kabupaten Natuna berada di urutan 319 (skor 12,00) dari 514 kabupaten dan kota pada jenis risiko bencana tanah longsor.

Kabupaten Natuna berada di posisi tengah ke bawah dengan kelas risiko sedang. Bencana tanah longsor menjadi bencana dengan indeks risiko sedang bagi Kabupaten Natuna karena kondisi geografis, geologis, topografi, serta kegiatan masyarakat berupa bertempat tinggal, berkebun, beternak, dan usaha ekonomi lainnya di area rawan terdampak longsor seperti di sekitar kaki gunung, kaki bukit dan lereng-lereng curam.

Selain di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur, di 6 kecamatan lain juga ditemui pemukiman dan tempat usaha masyarakat yang berdekatan dengan gunung, bukit, dan lereng yang memiliki tingkat kemiringan lereng 30%-45%. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Pulau Tiga, dan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Natuna tanggal 6 Maret 2023 menimpa masyarakat yang tinggal di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Infografis yang dirilis Diskominfo Kabupaten Natuna menampilkan data kerugian material berupa 100 rumah penduduk terdampak, 1 rumah ibadah rusak, 200 meter jalan rusak dan tertimbun material longsor, disamping rusaknya jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan jaringan air bersih.

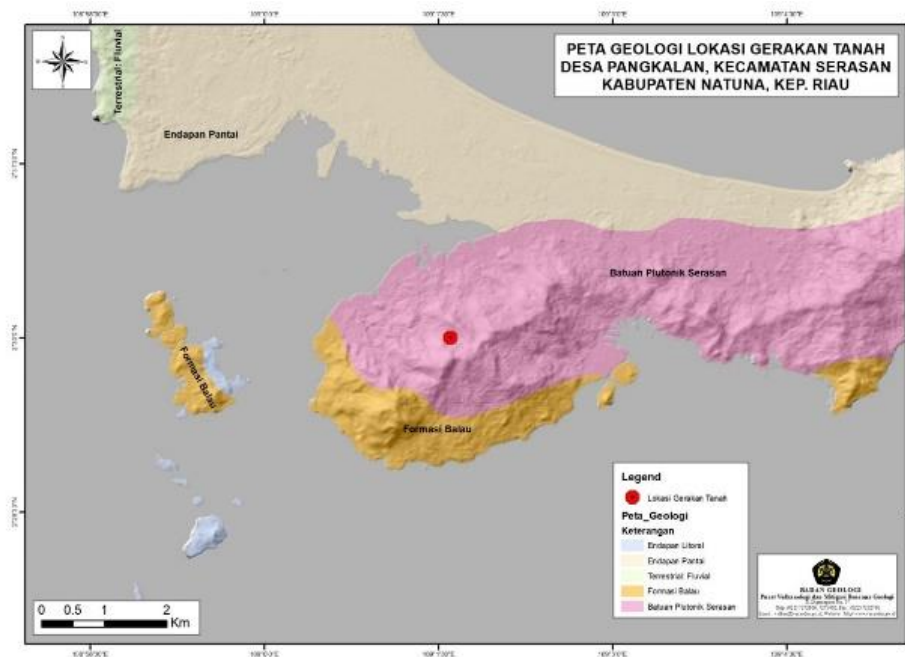
Jumlah korban bencana tanah longsor sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 tercatat sebanyak 54 orang meninggal dunia. Dari 54 orang korban diantaranya 48 jenazah telah teridentifikasi dan 6 korban masih dalam pencarian. Dari sisi jumlah korban jiwa, BNPB menyatakan bahwa bencana longsor di Natuna adalah kejadian longsor paling buruk sepanjang sejarah longsor di Indonesia (www.liputan6.com).

Masyarakat yang mengungsi meninggalkan rumah tempat tinggal

ditampung di beberapa titik pengungsian. Pengungsi adalah kelompok masyarakat yang rumahnya terdampak longsor dan masyarakat yang rumahnya tidak terdampak longsor secara langsung, tetapi berada di lokasi rawan longsor lainnya.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa penyebab bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna tanggal 6 Maret 2023 adalah (1) kemiringan lereng tebing yang curam, (2) tanah pelapukan yang tebal dari batuan tua (*pra tersier*) berupa lapukan Granodiorit, dan (3) curah hujan yang tinggi/ekstrem dengan durasi lama sebagai pemicu terjadi gerakan tanah (www.geologi.esdm.go.id).

Berdasarkan Peta Geologi Regional Natuna (Pusat Survei Geologi) batuan penyusun di daerah bencana tanah longsor Natuna termasuk dalam Batuan Plutonik Serasan yang tersusun Granodiorit Biotit dan Granit Hornblenda dengan helatan metasedimen (Gambar 1).



Gambar 1.
Peta Geologi Lokasi Geseran Tanah (Sumber: vsi.esdm.go.id)

Gambaran kondisi geografis yang menyangkut jumlah pulau, luas wilayah, ketinggian dan jarak ke pusat kabupaten

dari 2 kecamatan di Pulau Serasan yang terdampak tanah longsor dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Kondisi Geografis Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur

Kec.	Jumlah Pulau	Persentase Terhadap Jumlah Pulau di Kabupaten Natuna (%)	Luas Wilayah (km ²)	Tempat Tertinggi (mdpl)	Jarak Udara Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten (km)
Serasan	31	19,50	44,72	370	194,87
Serasan Timur	10	6,29	29,36	360	200,35

Sumber : BPS Natuna (2023)

Topografi Pulau Serasan didominasi area berbukit dengan kontur dan kemiringan lereng yang beragam. Masyarakat Pulau Serasan memanfaatkan lahan sebagai rumah tinggal, perkebunan, peternakan, dan usaha ekonomi lainnya.

Sementara itu dari aspek sosial ekonomi, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di 2 kecamatan yang terdampak longsor dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022

Kec.	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Serasan	5.505	123,10
Serasan Timur	3.349	114,07

Sumber : BPS Natuna (2023)

Jika setiap rumah tangga/kepala keluarga (KK) rata-rata terdiri dari 5 anggota keluarga, maka asumsi jumlah rumah tangga di Kecamatan Serasan sebanyak 1.101 keluarga dan di Kecamatan Serasan Timur sebanyak 670 keluarga.

Mayoritas penduduk Pulau Serasan bekerja sebagai nelayan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah rumah tangga perikanan tangkap dari tahun 2018-2022

serta kepemilikan perahu dan kapal penangkap ikan di kedua kecamatan pada tahun 2022 (Tabel 3).

Berdasarkan data pada Tabel 3 dan asumsi jumlah keluarga di masing masing kecamatan maka dapat diperkirakan persentase jumlah rumah tangga nelayan. Rumah tangga nelayan di Kecamatan Serasan sebanyak 53,59%, dan di Kecamatan Serasan Timur sebanyak 40,30%.

Tabel 3.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Tahun 2018-2022, dan Kepemilikan Perahu/Kapal Penangkap Ikan

Kec.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap					Kepemilikan Perahu/Kapal Penangkap Ikan		
	2018	2019	2020	2021	2022	Perahu Motor	Kapal Motor	Perahu Mesin Tempel
Serasan	572	582	582	590	590	223	197	39
Serasan Timur	258	295	265	270	270	57	155	19

Sumber : BPS Natuna (2023)

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak sosial-ekonomi masyarakat pasca bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna?
2. Strategi kebijakan apa yang mendesak dilakukan untuk pemulihan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pasca bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan dampak sosial-ekonomi masyarakat pasca bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna.
2. Memberikan rekomendasi strategi kebijakan yang mendesak dilakukan untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pasca bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami bagaimana dampak sosial ekonomi serta strategi

pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna khususnya di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur pasca bencana tanah longsor. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023. Lokasi penelitian di Kabupaten Natuna dengan sampel 2 kecamatan yang terdampak tanah longsor tanggal 6 Maret 2023 yaitu Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya. Sumber data primer berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh bencana tanah longsor, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penanggulangan bencana.

Data sekunder yang peneliti gunakan adalah data yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (BPBD), Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna (BPS), dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi pada

penelitian ini adalah observasi langsung. Alasan peneliti menggunakan teknik observasi ini karena berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dan untuk mengungkap informasi terkait dengan realita masyarakat pasca bencana.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Tujuan wawancara untuk mengungkap data atau informasi tentang dampak sosial ekonomi masyarakat agar lebih komprehensif dan akurat.

Dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen yang didapat dari BPBD. Pengecekan keabsahan data yang didapatkan di lapangan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan melalui pengecekan data yang diperoleh dari informan satu ke informan lainnya. Triangulasi metode yang peneliti lakukan dengan mengecek keabsahan atau kebenaran data hasil

wawancara dengan hasil observasi dan sebaliknya.

E. PEMBAHASAN

1. Dampak Sosial

Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Natuna tanggal 6 Maret 2023 membawa dampak sosial bagi masyarakat Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Selain menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 54 orang, longsor material juga menimbun serta merusak puluhan rumah tinggal, tempat usaha, kendaraan, tempat ibadah, sekolah, jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, dan saluran drainase (Gambar 2).

Bencana tanah longsor juga mengakibatkan hilang dan rusaknya dokumen pribadi masyarakat. Dokumen yang dimaksud adalah KTP, KK, Ijazah, Surat Kepemilikan Tanah, BPKB, dan dokumen penting lainnya. Pemulihan kepemilikan dokumen pribadi telah dilakukan oleh sebagian masyarakat yang terdampak bencana, dan sebagian yang lainnya belum melakukan.



Gambar 2.
Kondisi Pasca Tanah Longsor
Sumber : BPBD, 2023

Jalan utama yang berstatus Jalan Nasional sebagai akses penghubung utama antara Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur tertutup material longsoran berupa tanah, batuan, dan batang-batang pohon. Jalan yang tertutup material longsoran sepanjang 200 m menyulitkan upaya pencarian serta evakuasi korban yang tertimbun longsoran. Tertutupnya jalan oleh material longsoran juga menyulitkan distribusi bantuan logistik pada masyarakat yang terdampak.

Keterbatasan jumlah alat berat, truk, operator, dan peralatan pendukung di Pulau Serasan menjadi salah satu kendala

dalam upaya evakuasi korban. Dukungan alat berat, truk, dan operator didatangkan dari ibu kota kabupaten, dan membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 18 jam.

Selain faktor sarana, faktor sumber daya manusia juga mempengaruhi penanganan korban pasca bencana. Secara umum masyarakat setempat tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi bencana tanah longsor.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Natuna jumlah pengungsi sebanyak 1.863 orang. Pengungsi menempati 6 pos pengungsian (Tabel 4).

Tabel 4.
Sebaran Data Jumlah Pengungsi di Pos Pengungsian (10 Maret 2023)

No	Pos Pengungsian	Jumlah
1	Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan	635
2	Desa Payak	115
3	Desa Batu Berian	100
4	Pelimpak dan Masjid Al-Furqon	500
5	SMAN 1 Serasan	282
6	Desa Air Nusa	231
Total		1.863

Sumber : BPBD Kab. Natuna (2023)

Pengungsi tidak hanya masyarakat yang rumahnya terdampak langsung oleh longsoran. Pengungsi juga masyarakat yang dihimbau oleh BMKG untuk mengungsi karena bertempat tinggal pada jarak kurang dari 200 meter dari sepanjang kawasan longsoran.

Pemerintah Kabupaten Natuna menyiapkan lahan untuk relokasi 100 KK di lokasi yang tingkat kerawanan lebih rendah terhadap bahaya longsoran. BNPB membiayai pembangunan 100 unit rumah

di lokasi baru dan pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR (www.okezone.com).

Sebanyak ratusan pengungsi meninggalkan Pulau Serasan. Sebagian besar pengungsi menuju Pulau Natuna Besar (Pulau Bunguran) dan Pulau Bintan (www.kompas.com). Para pengungsi menggunakan transportasi laut Kapal Motor Bukit Raya yang bersandar di Dermaga PLBN Serasan (Gambar 3).



Gambar 3.

Ratusan Pengungsi Meninggalkan Pulau Serasan (Sumber : www.kompas.com)

Berdasarkan informasi yang didapat, sebagian pengungsi yang meninggalkan Pulau Serasan adalah pengungsi yang sebelumnya ditampung di pos pengungsian, sebagian lagi adalah masyarakat yang tidak ditampung di pos pengungsian. Para pengungsi memilih tinggal di rumah kerabat di luar Pulau Serasan. Beberapa alasan pengungsi meninggalkan Pulau Serasan adalah; (1) kehilangan tempat tinggal, (2) kehilangan anggota keluarga, (3) hilang/rusaknya tempat usaha, (4) trauma psikologis, dan (5) mengantisipasi bencana longsor berikutnya.

Para pengungsi yang menempati rumah kerabat di Pulau Bunguran, Pulau Bintan, dan pulau lainnya akan mengakibatkan bertambahnya beban pengeluaran keluarga yang ditempati. Perlu adanya pendataan secara mendetail terhadap para pengungsi terkait dengan rencana tinggal dalam jangka waktu pendek, jangka waktu lama, atau untuk selamanya.

Mobilisasi masyarakat dalam jumlah besar dari suatu wilayah ke wilayah lain akan berdampak pada demografi

kependudukan. Jumlah pengungsi yang meninggalkan Pulau Serasan pada kisaran 5% dari total jumlah penduduk Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Perubahan demografi tersebut akan berakibat pada perubahan jumlah permintaan bahan makanan utama, bahan bakar minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, akan berdampak pada tingkat kerawanan sosial bagi daerah yang dituju dan daerah yang ditinggalkan.

2. Dampak Ekonomi

Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa mayoritas rumah tangga di Pulau Serasan adalah Rumah Tangga Perikanan Tangkap. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi dari masyarakat, longsor yang terjadi di beberapa titik termasuk longsor terbesar pada tanggal 6 Maret 2023 tidak berdampak secara langsung terhadap alat-alat produksi perikanan tangkap. Sejumlah kapal motor dan perahu milik masyarakat yang ditambat di pelabuhan dan tambatan-tambatan perahu tidak rusak

atau hilang akibat adanya tanah longsor. Demikian juga dengan alat produksi tangkap lainnya seperti jaring, pukot, pancing, dan *box fiber*.

Dampak ekonomi bencana tanah longsor terhadap nelayan lebih terletak pada keluarga/rumah tangga korban bencana yang anggota keluarganya menjadi nelayan. Korban meninggal dunia yang bertatus sebagai kepala keluarga yang bekerja sebagai nelayan, pekerjaannya akan diteruskan oleh anggota keluarga lainnya yang memiliki keterampilan dalam usaha penangkapan ikan. Jika anggota keluarga yang “diwarisi” alat-alat produksi ikan tangkap tidak memiliki keterampilan penangkapan ikan, maka alat-alat produksi ikan tangkap dapat dijual sebagai modal usaha lainnya.

Usaha ekonomi lain sebagai pengalihan dari usaha perikanan tangkap yang sesuai untuk masyarakat Pulau Serasan adalah rumah makan, warung kopi, bengkel kendaraan, penjahit, les/bimbingan belajar/kursus, jasa cuci pakaian (*laundry*), dan pertukangan. Keputusan masyarakat untuk beralih usaha membutuhkan modal dan keterampilan.

3. Strategi Kebijakan Pemulihan Kondisi Sosial-Ekonomi

Untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Serasan memerlukan beberapa strategi kebijakan. Strategi kebijakan yang dilakukan harus efektif, efisien, dan mendapatkan dukungan publik. Kebijakan efektif dalam arti kebijakan yang tepat dalam memulihkan kondisi sosial-ekonomi

masyarakat. Kebijakan efisien dalam arti memiliki rasio biaya-manfaat yang rendah. Kebijakan yang didukung publik artinya kebijakan yang dilaksanakan benar-benar bertujuan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan bisnis, kepentingan elektabilitas/popularitas, dan kepentingan pribadi/kelompok.

Upaya yang dilakukan saat masa krisis telah tepat. Upaya yang dimaksud yaitu pencarian dan pertolongan terhadap korban, pemberian bantuan makanan dan kebutuhan pokok kepada para pengungsi, serta perawatan kesehatan bagi pengungsi yang mengalami gangguan kesehatan.

Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana menunjukkan bahwa penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna dilaksanakan secara kolaboratif. Unsur-unsur di luar Pemerintah Kabupaten Natuna yang terlibat dalam Tim Penanganan Bencana meliputi Kodim 0318 Natuna, Polres Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, Lanud Raden Sadjad, Lanal Ranai, Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Natuna, Biddokkes Polda Kepri, PMI Natuna, Tim Teknologi Modifikasi Cuaca (BMKG, BRIN, TNI AU), PLN Rayon Natuna, PT. Telkom Indonesia Cabang Ranai, Perwakilan Instansi Pusat (Kemenko PMK, Kementerian PUPR, Kemensos, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Kemenkominfo, PUSKRIS Kemenkes), serta ormas dan relawan.

Pada tahap pra bencana dapat dilakukan mitigasi sebagai cara untuk meminimalisasi dampak bencana.

Pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat tanggap bencana, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, dan diseminasi kebencanaan dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kabupaten Natuna. Peningkatan pemahaman masyarakat yang bermukim di sekitar area rawan bencana ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk memilih lokasi hunian yang lebih aman.

Pada saat terjadi bencana tanah longsor koordinasi dan komunikasi yang intensif di dalam Tim Penanganan Bencana sangat diperlukan. Data dan informasi yang akurat mengenai kondisi lokasi yang terdampak tanah longsor menentukan langkah-langkah penanganan berikutnya meliputi jumlah personil yang ditugaskan, jumlah dan jenis peralatan yang dibutuhkan, serta jumlah logistik dan sarana pendukung yang dibutuhkan.

Pusat Informasi Bencana yang dikoordinir oleh Dinas Kominfo dapat meminimalisir kesimpangsiuran data dan informasi, serta mencegah beredarnya informasi palsu. Penyebaran informasi memanfaatkan akun media sosial melalui platform *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*. Dinas Kominfo juga bertugas melakukan pemutakhiran data korban, bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kabupaten Natuna mengkoordinir pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban tanah longsor. Dalam

melaksanakan tugasnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kabupaten Natuna berkolaborasi dengan anggota TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, TRC BPBD, PMI, ormas dan relawan.

Dinas Sosial mengkoordinir penyiapan lokasi dan fasilitas evakuasi yang layak dan inklusif, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, operasional dapur umum, serta pemulihan trauma psikologis. Dinas Sosial berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koramil Serasan, Polsek Serasan, ormas dan relawan.

Pembagian tugas yang jelas antar unsur di dalam Tim Penanganan Bencana dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih tanggung jawab. Setiap pelaksanaan langkah-langkah penanganan bencana dikomunikasikan dalam rapat pembahasan.

Strategi kebijakan untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Serasan pasca bencana tanah longsor adalah :

1. Pendataan secara lebih mendetail terhadap kelompok masyarakat pengungsi yang meninggalkan Pulau Serasan terkait dengan rencana lamanya tinggal.
2. Pemulihan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Pulau Serasan berupa perbaikan jalan, saluran drainase, jaringan air bersih, jaringan komunikasi, dan jaringan listrik di Pulau Serasan.
3. Pemulihan fasilitas umum berupa perbaikan tempat ibadah dan sekolah.

4. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang beralih usaha ke usaha ekonomi rumah tangga baru.
5. Penyertaan modal/pemberian modal usaha yang tidak membebani masyarakat dengan persyaratan yang mudah.
6. Penguatan faktor-faktor produksi perikanan tangkap berupa jumlah alat-alat produksi dan kualitas sumber daya manusia.
7. Penguatan sosial masyarakat melalui pembentukan dan pelatihan komunitas tanggap bencana yang berbasis masyarakat.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna 6 Maret 2023 mengakibatkan 54 orang meninggal dunia, kerusakan infrastruktur, rusak dan hilangnya dokumen pribadi masyarakat, ratusan orang mengungsi, 100 KK direlokasi ke tempat hunian baru, sebagian rumah tangga terdampak longsor tidak dapat meneruskan usaha perikanan tangkap dan beralih usaha.
2. Rekomendasi strategi kebijakan pemulihan kondisi sosial-ekonomi pasca bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna melalui perbaikan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, pelatihan keterampilan usaha peralihan dari perikanan tangkap, pemodalannya usaha, penguatan produksi perikanan tangkap, dan penguatan komunitas tanggap bencana berbasis masyarakat.

G. REKOMENDASI

1. BPBD Kabupaten Natuna bekerja sama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kabupaten Natuna mengintensifkan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kebencanaan terhadap masyarakat.
2. Dinas PUPR Kabupaten Natuna memprioritaskan program dan kegiatan pemulihan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat Pulau Serasan, berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Kepri dan Kementerian PUPR.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna memprioritaskan program pelatihan wirausaha non perikanan tangkap.
4. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna memprogramkan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perikanan tangkap.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna memprogramkan pemodalannya usaha bagi masyarakat terdampak bencana, bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Cabang Natuna, Bank Mandiri Cabang Natuna, BRI Cabang Natuna, dan PT. Pegadaian Kantor Unit Pelayanan Cabang Natuna melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Daftar Pustaka

Buku

- BNPB. (2021). *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021*. Jakarta : Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
- BPS Kabupaten Natuna. (2023). *Kabupaten Natuna Dalam Angka*. Natuna : BPS Kabupaten natuna

Jurnal

- Naryanto, H.S., Soewandita, H., Ganessa, D., Prawiradisastra, F., dan Kristijono, A. (2019). Analisis Penyebab Kejadian dan Evaluasi Bencana Tanah Longsor di Desa banaran, Kecamatan Pulung, kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Tanggal 1 april 2017. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol.17 issue 2, 2019 hal 272-282.
- Pareta, K. & Pareta, U. (2012). Landslide Modeling and Susceptibility Mapping of Giri River. *International Journal of Science and Technology*, Vol. 1 No. 2, 2012: pp.91-104.

Website

- <https://geologi.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tanggapan-bencana-gerakan-tanah-di-kabupaten-natuna-kepulauan-riau-6-maret-2023>, diakses 12 maret 2023.
- <https://nasional.okezone.com/read/2023/03/09/337/2777905/longsor-natuna-100-kk-bakal-direlokasi>, diakses 11 maret 2023.
- <https://www.ompas.id/baca/foto/2023/03/12/ratusan-pengungsi-meninggalkan-pulau-serasan>, diakses 14 Maret 2023.
- <https://www.liputan6.com/news/read/5233051/longsor-di-natuna-telan-puluhan-korban-jiwa-bnpb-bencana-longsor-terburuk-yang- pernah-terjadi> , diakses 15 Maret 2023